

EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

Oleh :

Budi Dharma ¹⁾

Matius Bangun ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail :

bdarma76@gmail.com ¹⁾

udastudy28@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

This research on BSPS uses a qualitative approach by way of description, namely in the form of words and language in specific contexts and by using various scientific methods (Hardiansyah, 2010:9). `Qualitative research method in this study using primary data sources through interviews with key informants, namely those who understand and have authority regarding the problems of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Subulussalam City. As well as supporting informants, namely those who know the problems but do not have the authority to execute problems that arise in the field. The results of the study are that the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is not optimal because there is still a lack of socialization, resulting in a lack of understanding of both administrative and technical procedures/requirements. The driving factors in the Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) consist of Strength (There is a legal umbrella for BSPS, Availability of funds from the State Budget, Establishment of Central-Regional Coordination and Opportunities (There is a Technical Team from the Ministry, Availability of Assistant Personnel. Field operational assistant funds). While the Inhibiting Factors are Weaknesses (Limitations on Socialization of the BSPS Program; Distribution of materials and materials, Recipients' lack of knowledge about accountability) and Threats or Obstacles (High rainy weather during construction, Changes in policy regarding BSPS, Continuity of the BSPS program). (BSPS) in the future with an Aggressive Strategy, namely the Strategy of Using STRENGTH by utilizing OPPORTUNITIES. Using Strength, namely: There is a BSPS legal umbrella, Availability of funds from the APBN, Central-Regional Coordination Establishment by Utilizing Opportunities, namely: There is a Technical Team from the Ministry, Availability a Field Operational Assistant Fund Assistance.

Keywords: Program, Self Help Housing Stimulant (BSPS)

ABSTRAK

Penelitian tentang BSPS ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi yaitu dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Hardiansyah, 2010:9). `Metode penelitian Kualitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dengan Informan Kunci yaitu yang memahami dan memiliki kewenangan tentang permasalahan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Subulussalam. Serta Informan Pendukung yaitu yang mengetahui permasalahan namun tidak memiliki kewenangan dalam mengeksekusi permasalahan yang timbul di lapangan. Hasil penelitian adalah Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum optimal karena masih kurangnya Sosialisasi sehingga berdampak kurangnya pemahaman akan procedure/persyaratan baik administrasi maupun teknis. Faktor Pendorong dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri dari Kekuatan (Terdapat payung hukum BSPS,

Ketersediaan dana dari APBN, Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dan Peluang (Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga Pendamping.Dana Pendamping oprasional lapangan). Sedangkan Faktor Penghambat adalah Adanya Kelemahan (Keterbatasan Sosialisasi Program BSPS; Penyaluran bahan dan material, Minimnya pengetahuan penerima tentang pertanggungjawaban) serta Ancaman atau Hambatan (Cuaca hujan tinggi saat konstruksi, Perubahan kebijakan tentang BSPS, Kesenambungan program BSPS). Penyelenggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke depannya dengan Strategi Agresif yaitu Strategi Menggunakan KEKUATAN dengan memanfaatkan PELUANG. Menggunakan Kekuatan yaitu : Terdapat payung hukum BSPS, Ketersediaan dana dari APBN, Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dengan Memanfaatkan Peluang yaitu : Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga Pendamping Dana Pendamping oprasional lapangan.

Kata Kunci: Program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan utama (primer) yang salah satunya adalah kebutuhan akan papan (perumahan) disamping kebutuhan sandang dan pangan. Namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan primer ini masih jauh dari harapan (belum memuaskan) secara menyeluruh bagi masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kemiskinan. Kemiskinan inilah yang menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk memiliki rumah berstandar lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Menyikapi hal yang demikian maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan pembangunan nasional memiliki visi untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sebagaimana

yang diamanhkan oleh Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 / 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berbagai faktor yang menjadi penyebab antara lain adalah rendahnya lapangan pekerjaan, terbatasnya keterampilan yang dimiliki masyarakat sehingga adanya kesenjangan dalam kemampuan masyarakat terhadap daya beli, terkhusus masyarakat miskin atau sering juga disebut Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang menjadi syarat dalam mendapatkan bantuan yang dikelompokkan kedalam masyarakat miskin yang memiliki penghasilan rendah bahkan di bawah angka rata-rata pendapatan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang salah satunya adalah rumah layak huni.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan kementerian PUPR bertugas untuk menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan Perumahan Swadaya yang berada di bawah kendali Direktorat Rumah Swadaya yang berdasarkan Permen PUPR No. 3 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Direktorat Rumah Swadaya memiliki tugas memberikan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Prinsip dasar dari kebijakan Perumahan Swadaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga masyarakat bisa merasakan atau memiliki Rumah Layak Huni dan lingkungan hidup yang sehat dan asri. Program BSPS ini berjalan sudah berjalan 6 (enam) tahun sejak tahun 2015 dan di harapkan tetap berjalan sampai beberapa tahun ke depan sesuai dengan permasalahan yang di hadapi. Program yang dilaksanakan oleh Pemko Subulussalam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Fenomena lapangan yang di temukan oleh peneliti di Kota Subulussalam menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum memiliki rumah yang layak huni, aman, sehat dan nyaman. Dengan adanya permasalahan tersebut terbentuklah suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut

merupakan respon atas adanya permasalahan yang terjadi tengah masyarakat.

Di Kota Subulussalam program ini sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun sehingga perlu adanya suatu evaluasi baik dievaluasi dari segi Tujuan, Akuntabilitas serta masukan yang di berikan untuk kebijakan yang lebih baik di masa datang. Melalui evaluasi akan di peroleh Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat baik secara internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (Peluang dan Hambatan) sehingga di peroleh suatu strategi ke depan sehingga program BSPS dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang telah di rencanakan sebelumnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Evaluasi

Menurut Teguh Yuwono (2002 : 132) bahwa tujuan Evaluasi setidaknya-tidaknya mencakup 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya,
- b. Menunjukkan bentuk akuntabilitas kepada publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan tersebut, dan
- c. Untuk memberikan masukan (saran-saran/rekomendasi) pada kebijakan-kebijakan publik yang akan di ambil dimasa yang datang.

Demikian juga dengan defenisi yang diberikan oleh Arikunto dan Cepi (2008:2),

bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan / kebijakan. Ditambahkan oleh Djaali dan Pudji (2008) : pengertian dari penilaian itu sendiri sebagai suatu proses untuk mengetahui ataupun menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.

2.1.1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi adalah salah satu tahapan kegiatan pada siklus kebijakan publik di mana sebuah kebijakan publik yang diawali dengan adanya Isu yang kemudian diikuti dalam sebuah perumusan, dilanjutkan dengan formulasi kemudian di laksanakan (di implementasi). Dimana dalam penelitian ini di fokuskan pada evaluasi dalam implementasi kebijakan. Dalam evaluasi analisis yang di gunakan sangat berhubungan dengan tujuan dari suatu evaluasi serta fenomena yang di jumpai di lapangan.

William N. Dunn (2003;609) memberikan pendapat bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk :

- a. Memberi informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan publik
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target,
- c. Memberi

sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah serta rekomendasi.

Selanjutnya Arikunto dan Cepi (2008:2), menambahkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian juga ditambahkan oleh Djaali dan Pudji (2008) : pengertian dari penilaian itu sendiri sebagai suatu proses untuk mengetahui ataupun menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Tidak jauh berlainan dari filosofi di atas, Sudjana(2006: 48) melaporkan paling tidak ada 6 perihal tujuan penilaian yang ialah buat:

- a) Membagikan masukan untuk pemograman program;
- b) Menyuguhkan masukan untuk pemilik ketetapan yang berhubungan dengan perbuatan lanjut aktivitas serta program;
- c) Membagikan masukan untuk pemilik ketetapan mengenai perubahan ataupun koreksi program atau aktivitas;
- d) Membagikan masukan yang bertepatan dengan aspek pendukung serta penghalang program atau aktivitas;
- e) Membagikan masukan buat aktivitas dorongan serta pembinaan(pengawasan, pengontrolan, serta monitoring) untuk eksekutor, pengelola serta eksekutif program.

Dari berbagai pengertian evaluasi tersebut maka secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang suatu program ataupun kegiatan untuk mendapatkan sebuah nilai terhadap keberhasilan maupun dampak yang diakibatkan terhadap program ataupun kegiatan tersebut. Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai.

Dalam kaitannya dengan suatu program evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui 4 aspek yaitu : a) Proses pembuatan kebijakan, b) Proses implementasi kebijakan, c) Konsekuensi kebijakan, d) Efektivitas dampak kebijakan.

2.1.2. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijaksanaan terpaat dengan pertanggungjawaban penguasa, bagus pusat ataupun wilayah, atas kebijakan-kebijakan yang didapat penguasa kepada DPR atau DPRD serta warga besar. Terdapat sebagian ruang lingkup akuntabilitas semacam yang dikemukakan oleh sebagian orang pakar semacam yang dikemukakan

oleh Bimtoro Tjokroamidjojo(2001: 45) dalam novel *Pembaruan Administrasi Khalayak* yang menarangkan kalau akuntabilitas mencakup:

- 1) Akuntabilitas Politik dari pejabat publik melalui lembaga perwakilan.
- 2) Akuntabilitas Keuangan melalui kelembagaan instansi yang bertanggung jawab atas anggaran dan pengawasan BPKserta BPKP.
- 3) Akuntabilitas Hukum dalam bentuk aspek legalitas dan pengembangan perangkat hukum.
- 4) Akuntabilitas Ekonomi (efesiensi dan efektivitas) dalam bentuk likuiditas dan dalam suatu pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab pada rakyat melalui sistem perwakilan.

Konsep akuntabilitas dalam implementasinya bukanlah merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dapemerintah baik kementerian maupun non kementerian menjalankan tugas pokok dan fungsi administratif dalam kaidah akuntabel . Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep

akuntabilitas belum mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial, ekonomi, hukum dan politik.

2.1.3. Masukan Kebijakan

Masukan Kebijakan adalah opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah baik masalah sosial, ekonomi, politik, dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat. Adapun masukan yang di berikan atas sebuah evaluasi kebijakan antara lain adalah :

- Rumuskan beberapa kriteria evaluasi yang relevan dengan tujuan masyarakat;
- Analisis efek dan dampak tiap Alternatif Kebijakan yang diambil terhadap kriteria-kriteria tersebut; dan
- Tetapkan Alternatif yang terbaik (lebih banyak unsur positif) dari alternatif alternatif lainnya.

Melalui masukan kebijakan yang juga sering di identikan dengan rekomendasi adalah hal-hal yang akan di pertimbangkan dalam pembuatan kebijakan berikutnya setelah mengevaluasi apa yang di temukan dalam tujuan kebijakan sebelumnya serta

hal-hal pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya.

2.2. Kebijakan

Soejana (2006:48) menyatakan setidaknya terdapat enam hal tujuan adanya suatu evaluasi terhadap kebijakan yaitu untuk : a) Memberikan masukan bagi perencanaan / program, b) Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut kegiatan dan program, c) Memberikan masukan bagi pejabat public pengambil keputusan tentang modifikasi / perbaikan program, d) Memberikan masukan / rekomendasi yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat yang di temukan dalam suatu penerapan kebijakan, e) Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksanaan program / kegiatan.

Demikian juga sebagaimana di kemukakan oleh Amir Santoso *dalam* Winarno (2002 : 17) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan dengan menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun kebijakan itu meliputi tiga unsur penting yaitu : a) Suatu program kebijakan yang mengandung nilai-nilai dan

kegiatannya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, b_ Kebijakan itu sebagai penetapan program, c). Pengaruh dari pada kebijakan berlaku terhadap sejumlah besar orang atau punya kekuatan besar untuk mempengaruhi kekuatan orang lain.

2.3. Rumah Tak Layak Huni

Adapun aspek legalitas dari Program . kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Peraturan Menteri KeMenterian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011. Program ini merupakan fasilitas yang di berikan pemerintah dengan memberikan sejumlah dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Maksud dan tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni melalui pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut. Program bantuan ini dimaksudkan agar mampu masyarakat di maksud dapat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya . Demikian juga sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Rumah Swadaya bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Rumah

swadaya tersebut di berikan stimulant untuk dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Melalui bantuan Perumahan Swadaya ini penghuni rumah yang tak layak huni diberikan stimulant berupa rangsangan dana bantuan untuk merenovasi atau membangun rumah baru sesuai kemampuannya dan bantuan stimulant dari pemerintah. Perumahan sehat merupakan konsep dari perumahan sebagai faktor yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya sesuai dengan yang di tekankan oleh PBB mengenai Kesehatan dan Lingkungan, (2001).

Konsep tersebut melibatkan pendekatan sosiologis dan teknis pengelolaan faktor risiko dan berorientasi pada lokasi, bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya, serta mencakup unsur rumah tyang memiliki penyediaan air minum dan sarana / prasarana lainnya yang memadai untuk memasak, mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah lainnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat utama penelitian ini dilakukan di jajaran Pemerintah Kota Subulussalam, utamanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana, Badan Perencana Pembangunan

Daerah (Bappeda) serta beberapa lingkungan kecamatan tempat lokasi pelaksanaan pekerjaan dan tempat lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Waktu penelitian di rencanakan pada bulan Mei sampai Juli 2022.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian tentang BSPS ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan cara deskripsi yaitu dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah (Hardiansyah, 2010:9). Dilanjutkan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif (2004:6) yang mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian Kualitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dengan Informan Kunci yaitu yang memahami dan memiliki kewenangan tentang permasalahan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Subulussalam. Serta Informan Pendukung yaitu yang mengetahui permasalahan namun tidak

memiliki kewenangan dalam mengeksekusi permasalahan yang timbul di lapangan.

3.3 Sumber Data Penelitian

Lofland dkk *dalam* Moleong (2010:157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam suatu penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu : Data Primer dan data Sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu para pihak yang dijadikan informan melalui hasil wawancara. Adapun Teknik Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu digunakan pedoman-pedoman wawancara atau *interview guide*, dengan maksud agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya, agar data yang dikumpulkan tidak terlepas dari konteks permasalahan (Moleong, 1994 : 74).

b) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah data yang sudah tersedia di berbagai Kota

Subulussalam khususnya instansi yang berhubungan dengan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kantor Camat, kelurahan dan juga desa yang mendapat alokasi Dana Bantuan Stimulan.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bagi Bungin(2010: 110) tata cara pengumpulan informasi selaku sesuatu tata cara yang bebas kepada tata cara analisa informasi ataupun apalagi jadi perlengkapan penting tata cara serta metode analisa informasi. Bersumber pada khasiat empiris, kalau tata cara pengumpulan informasi kualitatif yang sangat bebas kepada seluruh tata cara pengumpulan informasi serta metode analisa informasi merupakan tata cara tanya jawab mendalam(pemantauan), kesertaan, materi dokumenter dan metode-metode terkini semacam tata cara materi visual serta tata cara pencarian materi internet.

3.5. Analisis Data

Nazir(2005: 346) mengemukakan kalau analisa informasi ialah bagian yang amat berarti dalam tata cara objektif sebab dengan analisa informasi itu bisa diberi maksud serta arti yang bermanfaat dalam membongkar permasalahan riset. Effendi serta Maning dalam Masri Singarimbun,(2006).

a. Analisis Deskriptif

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah suatu kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, serta memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan sehingga memudahkan untuk dianalisis.

b. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, yang akan menghasilkan suatu rekomendasi dan opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut merupakan suatu keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.

c. Analisis SWOT.

Analisis SWOT di gunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor Kekuatan dan Kelemahan secara Internal dan Faktor-faktor Peluang dan Hambatan . ancaman secara Eksternal. Analisis tersebut akan dapat memfokuskan diri pada untuk menentukan langkah strategis

kebijakan. Kombinasi fokus tersebut adalah :

- a) Fokus pada kekuatan-peluang (S-O) untuk memperoleh alternatif Ofensif atau Agrsif dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- b) Fokus pada Kelemahan-ancaman (W-T) untuk memperoleh alternatif defensif (kebijakan Bertahan) dengan meminimalisasi Kelemahan untuk mengurangi Ancaman / hambatan;
- c) Fokus pada Kekuatan-Ancaman (S-T) yaitu Diversifikasi (penganekaragaman) kebijakan dengan menggunakan Kekuatan untuk mengurangi Ancaman dan
- d) Fokus pada Kelemahan-Peluang (W-O) yaitu Turn a Round (membuat kebijakan baru) dengan menopang kelemahan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan / peluang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Geografi Kota Subulussalam

Kota Subulussalam merupakan salah satu kota termuda di provinsi Aceh. Kota Subulussalam adalah kota pembentukan baru yang merupakan hasil pemekaran dari

kabupaten induk yaitu Aceh Singkil pada tahun 2007. Pemerintah kota Subulussalam telah melakukan terobosan guna memacu pembangunan disegala bidang pemerintahan termasuk salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin melalui bantuan Perumahan Swadaya yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan ketetapan Undang-undang No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam

Berdasarkan data terakhir yang peneliti kumpulkan pada tahun 2022, Pemerintahan Kota Subulussalam sudah terdiri dari 5 wilayah kecamatan dengan 82 gampong, 8 Kemukiman dan 272 Dusun, dengan rinciannya yaitu kecamatan Simpang Kiri terdiri dari 17 gampong dengan 2 kemukiman dan 67 Dusun, Kecamatan Penanggalan terdiri dari 13 gampong dengan 1 kemukiman dan 46 Dusun, Kecamatan Rundeng terdiri dari 23 gampong dengan 2 kemukiman dan 63 Dusun, Kecamatan Sultan Daulat terdiri dari 19 gampong dengan 2 kemukiman dan 65 Dusun, serta kecamatan Longkib terdiri dari 10 gampong dengan 1 kemukiman dan 80 Dusun.

4.2. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Peningkatan Perumahan Swadaya (BSPS)

ini di Kota Subulussalam sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun. Pembangunan Rumah Swadaya sejak tahun 2018 di Kecamatan Simpang Kiri 66 unit, Kec. Penanggalan 65 unit, Kec. Longkib 116 unit, Kec. Rundeng 86 unit dan Kec. Sultan Daulat 101 unit. Jumlah keseluruhan sudah di bangun baik di renovasi maupun bangunan baru 434 unit peningkatan Rumah Swadaya di Kota Subulussalam hingga tahun 2022.

Selaku pogram yang dilaksanakan oleh salah satu badan penguasa, program BSPS tertuju untuk warga berpendapatan kecil(MBR) buat sanggup mendesak serta tingkatan keswadayaan warga dalam kenaikan mutu rumah jadi pantas mendiami. Distribusi Program BPSPS merupakan buat penindakan rumah tidak pantas mendiami serta area cemar, penyediaan rumah pantas mendiami berintegrasi, dan mendesak padat buatan kas aspek perumahan sekalian ialah program Nasional yang implementasinya di wilayah wilayah.

a. Tujuan Kebijakan

Tujuan program bantuan Stimulan Perumahan Rakyat (BSPS) di Kota Subulussalam adalah bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan keswadayaan dmembangun baru atau peningkatan kualitas rumah

beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Program BSPS yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar atau tidak layak huni.

4.4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas (pertanggung jawaban) adalah akuntabilitas dari penyelenggara daerah ke Pemerintah yaitu ke Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Swadaya pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan karena sumber dana adalah dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Demikian juga Akuntabilitas politik kepada wakil rakyat karena Dana Alokasi Khusus ini di transfer ke daerah dan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam .

Sumber dana untuk pembiayaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu.

Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaporkan akuntabilitas hasil kerjanya kepada pemerintah (pusat) baik Laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan laporan insidentil terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan sistem akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntabilitas ini sesuai dengan bantuan yang di berikan pemerintah kepada Pemerintah Kota Subulussalam sebagai salah satu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Akuntabilitas politik mengacu pada kewajiban dan tanggungjawab pemangku jabatan publik untuk mengambil kebijakan dan melakukan langkah untuk sebesar-besar kepentingan publik secara keseluruhan. Akuntabilitas politik khususnya bagi para pejabat publik dan pemerintahan dapat bersifat formal prosedural. Dari segi ini, mereka mempertanggungjawabkan posisi dan wewenang sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

4.5. Masukan Kebijakan/Rekomendasi

Diperlukan evaluasi tentang besarnya bantuan agar di samakan dan masyarakat

yang akan menyesuaikan jenis perbaikan uang di lakukan. Tentu saja masyarakat ada yang menggunakan dana yang ada namun ada juga masyarakat yang memiliki status keuangan yang lebih baik dapat menambahkan biaya renovasinya dengan biaya bantuan yang di berikan oleh pemerintah.

Salah satu penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (enggan di tuliskan namanya) beralamat di Kecamatan Penanggalan yang di wawancarai peneliti menyatakan bahwa salah satu keluhannya adalah terlalu banyak persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu persyaratan adalah memiliki tanah yang di tandai dengan hak kepemilikan tanah. Warga tersebut menjelaskan bahwa ia dan keluarganya tidak memiliki surat tentang hak atas kepemilikan tanah tersebut karena di perolehnya secara turun temurun.

4.6 Faktor Pendorong dan Penggerak

Wawancara dengan Informan Utama yaitu di Bappeda, Dinas PUPR, Informan Pendukung / Tambahan yaitu masyarakat penerima bantuan yang beralamat di Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Langkib Kota Subulussalam maka teridentifikasi Faktor-faktor Pendorong yang peneliti kelompokkan masing-masing 3 (tiga) kelompok utama yaitu sebagai berikut :

- 1) Kekuatan :

- Terdapat payung hukum dalam program BPS,SPS,
- Ketersediaan dana dari APBN
- Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah

2) Peluang

- Adanya Tim Teknis dari Kementerian PUPR
- Tersedianya Tenaga Pendamping di lapangan.
- Dana Pendamping dari untuk oprasional lapangan

Disamping faktor Pendorong maka faktor Penghambat yaitu Kelemahan dan Ancaman diidentifikasi kedalam tiga faktor utama sebagai berikut :

3) Kelemahan

- Keterbatasan Sosialisasi Program BPS,SPS yang belum maksimal;
- Penyaluran bahan dan material berjalan yang tidak serentak,
- Minimnya pengetahuan tentang pertanggungjawaban

4) Hambatan.

- Cuaca hujan tinggi pada saat konstruksi pekerjaan,
- Perubahan kebijakan tentang BPS,SPS
- Kesenambungan program BPS,SPS

4.7 Strategi Kebijakan Program BPS,SPS

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS,SPS) di Kota Subulussalam di tujukan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu atau sering juga di sebut Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kelompok MBR tersebut tidak memiliki kemampuan untuk tinggal di rumah yang layak huni sebagaimana masyarakat lainnya yang relatif memiliki pendapatan lebih tinggi.

Kelompok ini tentunya tidak di biarkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Untuk itu Negara harus ikut campur untuk mengatasinya bukan karena keperihatinan semata namun merupakan Amanah dari Undang-Undang 45 di mana negara berkewajiban memberikan bantuan sehingga masyarakat tersebut dapat menghuni rumah yang layak.

Namun bantuan yang di berikan bukan untuk membuat warganya tidak berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri namun untuk memberdayakan kelompok masyarakat (sebagai stimulant) tersebut agar membantu sebagian dari permasalahan hidupnya dalam bidang kebutuhan primernya yaitu papan (perumahan).

4.7.1 Faktor Internal

Salah satu analisis Strategi yang sering di gunakan adalah Analisi SWOT yaitu suatu analisis yang dengan mempertimbangkan Faktor pendorong dan Penghambat baik secara Internal maupun Eksternal. Analisis strategi faktor internal merupakan suatu penilaian terhadap Kekuatan dan Kelemahan yang selanjutnya menyusun faktor-faktor tersebut kedalam tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Faktor Kekuatan :

Terdapat beberapa faktor Kekuatan yang di miliki Pemko Subulussalam dalam menentukan kebijakan dalam memberhasilkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut yaitu :

- Terdapat payung hukum dalam program BSPS,
- Ketersediaan dana dari APBN
- Terjalannya Koordinasi Pusat – Daerah

1) Faktor Kelemahan

- Keterbatasan Sosialisasi Program BSPS yang belum maksimal;
- Penyaluran bahan dan material berjalan yang tidak serentak,
- Minimnya pengetahuan tentang pertanggungjawaban

Jika faktor Kekuatan dan Kelemahan tersebut di analisis dengan SWOT maka dapat di jabarkan hasilnya seperti berikut :

Tabel Faktor Kekuatan dan Kelemahan dalam melaksanakan KAD, 2020

N o.	Kekuatan	Bobot	Rati ng	Skor
	1	2	3	4
1.	Terdapat payung hukum BSPS	3(0.300)	2	0.600
2.	Ketersediaan dana dari APBN	4(0.400)	3	1.200
3.	Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah	3(0.300)	3	0.900
	Sub t o t a l	A= 10.000	-	B=2.700
N o.	Kelemahan	Bobot	Rati ng	Skor
1.	Keterbatasan Sosialisasi Program BSPS;	3(0.375)	3	1.125
2.	Penyaluran bahan dan material,	2(0.250)	2	0.500
3.	Minimnya	3(0.375)	2	0.750

pengetahuan penerima tentang pertanggungjawaban	5)			
sub total	C=8.000	-	D=2.375	
Total	A-C=2.000	-	B-D=0.325	

Sumber : di olah oleh peneliti dari faktor Kekuatan dan Kelemahan KAD, 2020

4.7.2 Faktor Eksternal

Setelah mengetahui Faktor Internal tentang Kekuatan dan Kelemahan maka Faktor strategi Eksternal merupakan suatu penilaian terhadap faktor-faktor Eksternal dalam menyelenggarakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Adapun Faktor Peluang berdasarkan hasil wawancara dengan para informan baik Informan Utama maupun Informan pendukung yaitu :

- Adanya Tim Teknis dari Kementerian PUPR
- Tersedianya Tenaga Pendamping di lapangan.
- Dana Pendamping oprasional lapangan

Sedangkan Faktor Hambatan yang datangnya dari luar yang dapat di

kelompokkan kepada kelompok utama yaitu :

- Cuaca hujan tinggi pada saat konstruksi pekerjaan,
- Perubahan kebijakan tentang BPS
- Kesenambungan program BPS

Setelah mengetahui faktor-faktor eksternal tersebut sub sektor selanjutnya menyusun faktor-faktor tersebut kedalam tabel EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel Peluang dan tantangan dalam Penyelenggaran Perumahan Swadaya

No.	Peluang	Bobot	Rating	Skor
1.	Adanya Tim Teknis dari Kementerian	3 (0.300)	2	0.600
2.	Tersedianya Tenaga Pendamping.	3 (0.300)	3	0.900
3	Dana Pendamping oprasional lapangan	4 (0.400)	4	1.600
	Sub Total	10.000		3.100
No.	Ancaman	Nilai	Rating	Skor
1.	Cuaca hujan tinggi saat konstruksi	2 (0.250)	2	0.500

2	Perubahan kebijakan tentang BSPS	3 (0.375)	3	1.125
3	Kesinambungan program BSPS	3 (0.375)	3	1.125
	Sub Total	C=8.00 0	- -	D=2.75 0
	T o t a l	A- C=2.00 0		B- D=0.35 0

Sumber : diolah peneliti dari faktor

Peluang dan Ancaman , 2020

Untuk menganalisis dari ke-dua tabel tersebut yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal maka dapat diturunkan dalam bentuk Diagram Kuadran SWOT yang telah didapat dari hasil analisis sebelumnya untuk mengetahui secara pasti posisi penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Subulussalam .

Dari tabel SWOT didapatkan suatu diagram yang di maknai sebagai langkah dalam kebijakan yang akan ditempuh untuk peningkatan kinerja Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu suatu Strategi Agresif (Opensif) yaitu suatu strategi Menggunakan KEKUATAN dengan memanfaatkan PELUANG.

Menggunakan Kekuatan yaitu :

- Terdapat payung hukum BSPS
- Ketersediaan dana dari APBN
- Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dengan

Memanfaatkan Peluang yaitu :

- Adanya Tim Teknis dari Kementerian
- Tersedianya Tenaga Pendamping.
- Dana Pendamping oprasional lapangan

5. SIMPULAN

Simpulan

- a) Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum optimal karena masih kurangnya Sosialisasi sehingga berdampak kurangnya pemahaman akan procedure/persyaratan baik administrasi maupun teknis.
- b) Faktor Pendornng dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terdiri dari Kekuatan (Terdapat payung hukum BSPS, Ketersediaan dana dari APBN, Terjalannya Koordinasi Pusat–Daerah dan Peluang (Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga Pendamping.Dana Pendamping oprasional lapangan).

Sedangkan Faktor Penghambat adalah Adanya Kelemahan (Keterbatasan Sosialisasi Program BSPS; Penyaluran bahan dan material, Minimnya pengetahuan penerima tentang pertanggungjawaban) serta Ancaman atau Hambatan (Cuaca hujan tinggi saat konstruksi, Perubahan kebijakan tentang BSPS, Kesenambungan program BSPS).

- c) Penyelenggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke depannya dengan Strategi Agresif yaitu Strategi Menggunakan KEKUATAN dengan memanfaatkan PELUANG. Menggunakan Kekuatan yaitu : Terdapat payung hukum BSPS, Ketersediaan dana dari APBN, Terjalinnya Koordinasi Pusat–Daerah dengan Memanfaatkan Peluang yaitu : Adanya Tim Teknis dari Kementerian, Tersedianya Tenaga Pendamping Dana Pendamping oprasional lapangan.

Saran

- 1) Pemerintah perlu meningkatkan sosialis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga lebih mudah di pahami calon penerima. Demikian juga perlu penyesuaian kondisi masyarakat local dengan persyaratan teknis agar persyaratan status tanah calon penerima BSPS jika belum memiliki surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku cukup dengan Surat

Keterangan untuk selanjutnya pemerintah memfasilitasi untuk menda[atkan surat tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Faktor Pendorong dalam Penyelenggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) perlu terus di tingkatkan khususnya ketersediaan dana untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sedangkan Faktor Penghambat yang perlu di minimalkan adalah perubahan kebijakan yang terjadi di kementerian PUPR yang sehingga program dapat mencapai tujuan dan sasaran.
- 3) Penyelenggaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke depannya dengan Strategi Agresif di sarankan agar ada dana pendamping oprasional uuntuk petugas teknis lapangan yang bersumber dari APBD Kota Subulussalam.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku–Buku Cetak dan Elektronik :

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Terbitan Bumi Aksara.Nugroho,

- _____. 2008. Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Jakarta: Penerbit PT Buku Kita
- N, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua Yogyakarta: Terbitan Gadjah Mada University Press, hal. 610
- Ekowati dkk, (2005), Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi, Penerbit PT Rosdakarya, Bandung.
- Miles dan Hubberman, 1997/ Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Moleong, L.J. (2002) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, (2015). Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadri. (2000) Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif Yogyakarta, Terbitan Ghalia Gajah Mada University Press.
- Samudra, W. 2004. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta
- Sugiono (2010) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Terbitan. Alfabeta, 2010.
- Teguh Yuwono dkk. 2002. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widyoko, Eko Putro. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran (Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik) Yogyakarta: Terbitan Pustaka Pelajar
- Winarno dalam Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Konsep. Yogyakarta : Medpres
- Peraturan-Peraturan :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Thn 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 thn 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik menyebutkan tentang Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101/2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Jurnal-Jurnal :**
- Loisa Novany dkk (2014) dalam penelitiannya tentang Analisis pengelolaan Persampahan di Kelurahan Sindulang satu Kecamatan

Tuminting, Menado sebagai mana di
rilis pada Vol.6, No. 3: 321 - 331
November 2014 ISSN 2085-7020
Program Studi Perencanaan Wilayah
dan Kota Universitas Sam Ratulangi
Manado.

Indra Djaya Markinas dkk (2011) Hasil
Penelitian Sistem pengelolaan
Sampah di Pulau Bunaken. Program
Studi Perencanaan Wilayah & Kota
Terbitan Universitas Sam Ratulangi
Manado Sulawesi Utara.

Muchammad Zamzami Elamin (2018)
dalam penelitiannya yang berjudul
Analisis Pengelolaan Lingkungan
Sampah Pada Masyarakat Desa
Disanah Kecamatan Sreseh
Kabupaten Sampah dalam di lansir
dari Jurnal Kesehatan Lingkungan
(2018), Vol.10 No.4,

Muhammad Ananda Lody dkk (2012)
tentang Evaluasi Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS) di Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutaikartanegara

Ratih Widayanti dan Hj Weni Rosdiana
(2014) dalam penelitiannya tentang
Evaluasi Program bantuan Stimulasi
Perumahan Swadaya di Kelurahan
Tamanan Kecamatan Tulung Agung
Kabupaten Tulung Agung Email:
ratihwdyanti@gmail.com dan
hjwenirosdiana@unesa.ac.id